

**PANALISIS INDIKASI TAX EVASION DENGAN RASIO  
BENCHMARKING DI SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2010-2012  
DIBANDINGKAN DENGAN YANG DITETAPKAN DJP DAN  
RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SAAT INI**

**Mely Agustina Andrias dan Elisa Tjondro**

Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra

Email: mely\_indra@hotmail.com

**ABSTRAK**

*Benchmarking* adalah alat pengumpulan dan perbandingan dari pengukuran global, terutama tentang laporan keuangan dan kinerja perusahaan. *Benchmarking* sendiri sebenarnya lebih dikenal di bidang manajemen, kemudian metode *benchmarking* tersebut diadopsi oleh DJP dalam rangka melakukan pengawasan dan indikasi adanya *tax evasion* yang dilakukan Wajib Pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio *benchmarking* dapat mengidentifikasi suatu perusahaan melakukan *tax evasion*, selain itu tujuan ini juga ingin melihat apakah ada perbedaan antara rasio perhitungan perusahaan dari tahun 2010-2012 dengan rasio *benchmark* yang telah ditetapkan DJP dan masih relevankah dengan kondisi saat ini.

Dari hasil analisis kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa ada dua perusahaan yang diidentifikasi melakukan *tax evasion* terkait biaya usaha sedangkan dari hasil kuantitatif uji t-test diperoleh kesimpulan adanya perbedaan rasio perhitungan perusahaan 2010-2012 dengan DJP, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio DJP tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Kata kunci : Tax Evasion, Rasio Benchmarking, Laporan Keuangan sektor Pertambangan, Rasio DJP, Relevansi.

**ABSTRACT**

*Benchmarking is a collecting and comparing tool from the global measurement, specifically for financial statement and company performance. Benchmarking is better known in management and adopted by DJP in order to supervise and to indicate tax evasion practice by taxpayers. This research is conducted to determine how benchmarking ratio could identify tax evasion practice in companies. This research also aims to determine the difference between companies' calculated ratio in 2010-2012 compared to the established benchmarking ratio by DJP and its relevance with current condition.*

*Qualitative analysis results conclude that there are two companies conducting operating expenses tax evasion and t-test quantitative results conclude that there are differences between companies' calculated ratio in 2010-2012 compared to the established benchmarking ratio by DJP. Therefore, this research concludes that DJP ratio is not relevant with current condition.*

*Keywords: Tax Evasion, Benchmarking Ratio, Mining Sector Financial Statement, DJP Ratio, Relevance.*

## PENDAHULUAN

Menurut detik finance (Ramdhania El Hida, 2011) menyebutkan bahwa total penerimaan pajak di tahun 2010 lalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target Rp 661,4 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 98,1% atau Rp 649,042 triliun. Sedangkan untuk tahun 2011 Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak (A. Fuad Rahmany ,2012) menyebutkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Di tahun 2012 target penerimaan pajak menurut APBN-P tahun 2012, pajak diminta untuk memasok aliran dana masuk sebesar Rp. 1.016,237 triliun. Namun pada faktanya disebutkan dalam VIVAnews (Kurniawan, 2013), Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan negara yang masuk pada tahun 2012 hanya mencapai 95% dari target atau sejumlah Rp. 800 triliun.

Berdasarkan SE No. 96/PJ./2009, kondisi inilah yang mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan upaya keras namun cerdas dalam penggalan potensi penerimaan pajak. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan penyempurnaan metode analisis dalam penggalan potensi pajak. Selain itu, juga dapat dijadikan pedoman atau acuan Dirjen Pajak dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010-2012 terdapat sembilan jenis sektor usaha dalam perputaran bisnis di Indonesia, yaitu meliputi:

Lapangan Usaha	2010	2011	Kenaikan/Penurunan thn 2010-2011	2012	Kenaikan/Penurunan thn 2011-2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	985.470,50	1.091.447,30	-0,53%	1.190.412,40	-0,26%
2. Pertambangan & Penggalian	719.710,10	879.505,40	0,72%	970.599,60	-0,07%
3. Industri Pengolahan	1.599.073,10	1.806.140,50	-0,39%	1.972.846,60	-0,40%
4. Listrik, Gas & Air Bersih	49.199,00	56.788,90	0,00%	65.124,90	0,03%
5. Konstruksi	660.860,50	754.483,50	-0,05%	860.864,80	0,28%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	882.487,20	1.024.009,10	0,15%	1.145.600,90	0,10%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	423.172,20	491.283,10	0,07%	549.115,50	0,04%
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	466.563,80	535.152,90	-0,01%	598.523,20	0,05%
9. Jasa-jasa	660.365,50	783.970,50	0,35%	888.676,40	0,22%
Produk Domestik Bruto	6.466.851,90	7.422.781,20		8.241.864,30	
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	5.941.951,90	6.797.879,20		7.604.759,10	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011-2012)

Salah satu cara DJP menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta untuk mengidentifikasi dan meminimalisasikan Wajib Pajak melakukan tax evasion yaitu dengan melakukan model Benchmarking.

Sesuai dengan data yang dipaparkan di atas, ada tiga sektor yang memiliki penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto dari tahun 2010-2012 yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan sektor pertanian peternakan, kehutan, perikanan. Dari fakta tersebut, penelitian ini ingin mencoba untuk menganalisa benchmark perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan. Menurut Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik, mengatakan rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan turunnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi penyokong utama ekspor Indonesia terutama untuk provinsi diluar Jawa seperti NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Papua, Bangka Belitung.

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berbasis pada data Laporan Keuangan sektor pertambangan yang laporannya telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.

### **Pengertian *Benchmarking* Pajak**

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatnya disebutkan bahwa, Total Benchmarking merupakan proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

### **Perlakuan Akuntansi Di Sektor Pertambangan**

Ada dua metode akuntansi utama yang berlaku dan dapat diterima secara umum yaitu:

#### 1. Full Cost (FC)

Inti dari metoda FC adalah bahwa dalam kegiatan migas, kegiatan eksplorasi adalah suatu kegiatan yang sangat vital bagi perusahaan. Tanpa eksplorasi, cadangan minyak tidak akan pernah ditemukan. Mengingat resiko pada tahap eksplorasi ini sangat besar, maka adanya pemboran yang menghasilkan sumur (dry hole) adalah suatu yang tidak terelakan, sehingga metoda ini menganggap bahwa semua biaya eksplorasi baik berhasil maupun dry hole harus dikapitalisasi.

#### 2. Successful Effort (SE)

Sedangkan metode S.E ini adalah bahwa semua pengeluaran biaya (expenditure) yang tidak memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang harus dibebankan pada periode terjadinya biaya tersebut, hal ini sesuai dengan teori dasar Akuntansi. Dengan demikian, metoda SE akan membebankan biaya pemboran eksplorasi apabila sumur tersebut (dry hole) pada periode tersebut, namun apabila pemboran tersebut

sukses, maka biaya yang telah terjadi dapat dikapitalisasi (dibebankan sejalan dengan waktu manfaat dari aset tersebut). Para pendukung metode ini menganggap bahwa hanya pengeluaran (expenditure) yang berhubungan dengan penemuan prospek migas yang dapat dikapitalisasi.

### **Perlakuan Perpajakan Di Sektor Pertambangan**

Pada dasarnya, hanya pengeluaran, biaya dan kerugian yang diperkenankan oleh Undang-Undang atau peraturan perpajakan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Begitu juga untuk jenis PPh, batasan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetap berpatokan pada batasan yang diatur dalam Undang-Undang PPh. Perbedaannya adalah pengaturan tentang besaran cadangan biaya reklamasi sebagai satu biaya operasi yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan yang melakukan usaha pertambangan.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2009 pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa “cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.” Artinya bahwa perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan dapat membebankan biaya reklamasi dalam bentuk perkiraan cadangan reklamasi, yang dihitung berdasarkan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral. Kalaupun pada akhir masa penambangan terdapat selisih, atas selisih tersebut dapat dijadikan penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Besarnya dana cadangan biaya reklamasi dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jendral Pertambangan Umum.

### Rasio Benchmarking

#### 1. Gross Profit Margin (GPM)

GPM merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \text{ Atau } \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 2. Operating Profit Margin (OPM)

OPM adalah perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Bersih Dari operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 3. Pretax Profit Margin (PPM)

PPM merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPM} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 4. Corporate Tax To Turn Over Ratio (CTTOR)

CTTOR merupakan rasio pajak penghasilan terutang terhadap penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{Laba Bersih Dari operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 5. Net Profit Margin (NPM)

NPM adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. NPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 6. Dividend Payout Ratio (DPR)

DPR merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih, dan dihitung dengan rumus:

$$\text{DPR} = \frac{\text{Pembayaran Dividen Tunai}}{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}} \times 100\%$$

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.

#### 7. Rasio PPN (pn)

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:

$$\text{pn} = \frac{\text{Jumlah pajak masukan jan-des}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 8. Rasio Gaji/Penjualan (g)

Rasio gaji/penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah, dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan, dan dihitung sebagai berikut:

$$\text{G} = \frac{\text{Jumlah Biaya Gaji}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 9. Rasio Bunga/Penjualan (b)

Rasio bunga/penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha. Nilai rasio bunga/penjualan dihitung sebagai berikut:

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah Beban Bunga}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 10. Rasio Sewa/Penjualan (s)

Rasio sewa/penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap penjualan. Nilai rasio sewa/penjualan dihitung dengan rumus:

$$s = \frac{\text{Jumlah Biaya Sewa}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 11. Rasio Penyusutan/Penjualan (py)

Rasio ini merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap penjualan. Nilai rasio penyusutan/penjualan dihitung dengan cara:

$$py = \frac{\text{Jumlah Biaya Penyusutan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 12. Rasio Input Lainnya (x)

Rasio input lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio input lainnya/penjualan dihitung sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah Beban Lainnya}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 13. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)

Rasio ini merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap penjualan. Nilai pl dihitung dengan cara:

$$pl = \frac{\text{Penghasilan Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### 14. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)

Rasio biaya dari luar usaha/penjualan adalah rasio antara total biaya luar usaha terhadap penjualan. Nilainya dihitung sebagai berikut:

$$bl = \frac{\text{Biaya Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### Hubungan Rasio *Benchmarking* Untuk Indikasi *Tax evasion*

Hubungan antar rasio dapat dirumuskan dalam suatu persamaan:

1.  $10pn + g + b + OPM + x \approx 100\%$
2. atau  $10pn + g + b + x + PPM - (pl - bl) \approx 100\%$
3. atau  $10pn + g + b + x + NPM - (pl - bl) + CCTOR \approx 100\%$

Misalkan saja dari 14 rasio benchmark perusahaan yang dibandingkan dengan benchmarking DJP, diketahui ada beberapa rasio yang dibawah benchmark DJP (GPM, OPM, CTTOR, NPM), Maka dari rasio GPM, OPM, CTTOR, NPM, peneliti akan melihat rasio mana yang memiliki selisih paling besar misal: CTTOR. Maka dari ketiga rumus rasio dibawah ini, peneliti akan memilih menggunakan rumus ketiga yang memiliki unsur CTTOR dalam rumusnya, sedangkan apabila yang memiliki selisih paling besar yaitu rasio PPM maka peneliti akan menggunakan rumus kedua yang memiliki unsur PPM didalamnya.

### Pemanfaatan Analisis Secara Lebih Rinci Terkait Rasio *Benchmarking* dan Contohnya

Menurut SE No. 96/PJ./2009 memberikan penjelasan lebih rinci dalam melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak dan pengujian atas indikasi tax evasion. Berikut beberapa elemen utama yang wajib diuji dengan menggunakan benchmarking yaitu meliputi:

#### a. Biaya Usaha

Biaya Usaha yang dimaksud disini yaitu meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya. Istilah yang digunakan maupun cara penggolongan jenis-jenis beban mungkin berbeda-beda tergantung jenis usaha maupun model pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak. Biaya usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan Benchmark dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan rasio HPP/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio  $HPP/Penjualan = 100\% - GPM$ ;
  2. Membandingkan rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio  $Biaya\ Usaha\ Lain/Penjualan = GPM - OPM$ .
  3. Membandingkan hasil penjumlahan rasio HPP/Penjualan dan Biaya Usaha Lain/Penjualan diatas dengan rasio benchmarknya.
  4. Melakukan analisis terhadap hasil perbandingan tersebut.
- b. Koreksi Fiskal
- Dalam menghitung PPh terutang dalam suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan Penghasilan Kena Pajak. Nilai Penghasilan Kena Pajak pada dasarnya merupakan nilai Laba Komersial Perusahaan yang disesuaikan dengan sejumlah koreksi fiskal baik berupa Koreksi Fiskal Positif maupun Koreksi Fiskal Negatif, serta memperhitungkan sejumlah kompensasi kerugian tahun sebelumnya, jika ada. Rasio-rasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada usaha sejenis. Kewajaran tersebut dapat dinilai dengan membandingkan antara rasio PPh terutang/Laba bersih Komersial Wajib Pajak dengan benchmarknya, dimana rasio tersebut dapat dihitung dengan cara membagi CTTOR terhadap PPM. Hasil perbandingan tersebut, apabila ternyata rasio WP lebih rendah dibanding benchmark, harus dianalisis secara hati-hati apakah Wajib Pajak yang bersangkutan juga melakukan kompensasi kerugian, sebelum dapat menarik kesimpulan adanya indikasi bahwa Koreksi Fiskal Positif/Negatif yang dilakukan ternyata lebih rendah/tinggi dari yang seharusnya.
- c. Penghasilan dan Biaya Luar Usaha
- Pengujian atas penghasilan dan biaya luar usaha dilakukan dengan membandingkan nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) Wajib Pajak terhadap rasio pl dan bl benchmark. Analisis dilakukan terhadap hasil perbandingan tersebut.
- d. Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh
- Pengujian dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio yang berkaitan dengan objek Pemotongan dan Pemungutan PPh terhadap benchmarknya. Rasio-rasio yang dibandingkan meliputi rasio Gaji/Penjualan (g) terkait objek PPh pasal 21, rasio Bunga/Penjualan (b) terkait objek PPh Pasal 23, dan rasio Sewa/Penjualan terkait objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2).
- e. Kewajaran Pajak Masukan
- Pengujian kewajaran Pajak Masukan pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan rasio Pajak Masukan/Penjualan (pn) Wajib Pajak dengan rasio benchmarknya, serta membandingkan penghitungan pembelian bahan berdasarkan laporan keuangan dengan pembelian bahan (barang) berdasarkan pengkreditan pajak masukan.

### **Cara Penetapan Rasio *Benchmarking* di Negara Maju lainnya**

Berikut adalah beberapa dasar dalam menetapkan benchmarking di berbagai sektor di negara maju lainnya:

1. Australia
- Berdasarkan jurnal penelitian yang ditulis Ross H Wilson berjudul "Performance indicators and benchmarking in Australian agriculture; synthesis and prepectives" menjelaskan bahwa dalam menetapkan benchmarking dengan menetapkan patokan indikator, biasanya yang digunakan adalah kuat (tinggi/atas), rata-

rata/tengah, lemah (rendah/bawah). Selain itu, menurut Clark et al. (1999) menyatakan indikator kunci mengenai profitabilitas seperti disposable income untuk membayar biaya hidup, tagihan pajak dan pembayaran modal, dan modal layak untuk memastikan kapasitas investasi untuk penciptaan aset. Jadi disimpulkan bahwa dalam penerapan benchmarking, penetapan suatu rasio tersebut juga harus berdasarkan besar atau kecil, kuat atau lemahnya seluruhnya perusahaan atau individu dalam dikategorikan, sehingga hal tersebut akan memperobjektif hasil dari benchmarking tersebut.

2. Berdasarkan Jurnal penelitian oleh Muhamad Abduh yang berjudul “Sistem Informasi Kinerja Industri Konstruksi Indonesia: Kebutuhan Akan Benchmarking dan Integrasi Informasi” menjelaskan bahwa dalam proses penetapannya, haruslah berdasarkan rincian lebih detail mengenai indikator penilaian kerja untuk tingkat industri, tingkat perusahaan dan tingkat proyek agar rasio benchmarking menjadi lebih benar. Hal ini juga sudah diterapkan Inggris, USA, Brazil.

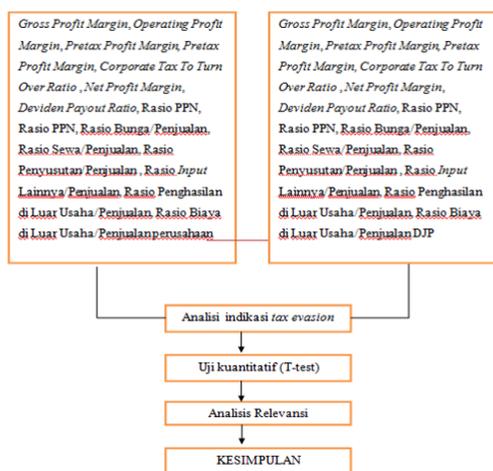
*Pretax Profit Margin, Corporate Tax To Turn Over Ratio, Net Profit Margin, Dividend Payout Ratio, rasio PPN, rasio gaji/penjualan, rasio bunga/penjualan, rasio sewa /penjualan, rasio penyusutan /penjualan, rasio penghasilan di luar usaha /penjualan, rasio biaya di luar usaha /penjualan, rasio input lainnya /penjualan.*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kuantitatif (Uji Independent t sample)
  - a. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji bersifat normal. Berikut adalah gambar dari hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov.
  - b. Uji Independent T Sample

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Kriteria pengujian yaitu :  $H_0$  diterima jika  $-t$  tabel  $< t$  hitung  $< t$  tabel dan  $H_0$  ditolak jika  $-t$  hitung  $< -t$  tabel atau  $t$  hitung  $> t$  tabel. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

## METODE PENELITIAN



Definisi operasional dalam penelitian ini adalah rasio *Gross Profit Margin, Operating Tax Profit Margin,*

RASIO	Nilai Hitun	Nilai Tabe	Hasil hipotesa
GPM	-3,427	2.005746	H0 ditolak
g	-7,808	2.006647	H0 ditolak
s	-10,205	2.079614	H0 ditolak
py	-91.68	2.009575	H0 ditolak
x	-6,116	2.007584	H0 ditolak
OPM	-8,548	2.008559	H0 ditolak
b	-5,194	2.036933	H0 ditolak
PI	5,077	2.010635	H0 diterima
BI	-3,545	2.036933	H0 ditolak
PPM	-6.312	2.004879	H0 ditolak
CTTOR	-7,247	2.006647	H0 ditolak
NPM	-7,247	2.009575	H0 ditolak
DPR	0	2.005746	H0 ditolak

Dari hasil SPSS Uji Independent Sample T-test untuk keempat belas rasio benchmarking dapat dilihat dari kolom Sig(2-Tailed) , ada dua rasio yaitu GPM dan bl yang memiliki jumlah Sig(2-Tailed) yang paling besar yakni 0,001. Oleh karena itu komponen rasio atas GPM dan bl menjadi dasar acuan yang pertama dilihat untuk dibandingkan dengan rasio benchmarking DJP.

Akan tetapi, fokus rasio utama yang dipilih yaitu GPM, hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari gambar diatas, GPM lebih menunjukkan selisih yang cukup jauh dibandingkan dengan data DJP dari tahun 2010-2012, sedangkan bl menunjukkan rentang selisih yang lebih mendekati dengan rasio dari DJP.
- b. Mengenai sifat dari kedua rasio tersebut, BL adalah biaya luar usaha lainnya yang biasanya bersifat insidental dimana tidak selalu setiap perusahaan memiliki elemen tambahan BL setiap tahunnya. Hal tersebut berbeda dengan GPM yang nantinya ada kaitannya dengan biaya usaha seperti gaji, sewa, penyusutan, dan lain-lain, dimana kaitan-kaitan

tersebut pasti selalu ada di setiap perusahaan walaupun jumlahnya berbeda-beda.

Ada dua fokus perusahaan pertambangan yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu GEMS dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) bergerak di bidang jasa perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Pada tanggal 13 Maret 1997 Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010. Sedangkan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) didirikan tanggal 16 Oktober 2001 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2003. Kantor pusat ENRG berlokasi di Bakrie Tower Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta. Saat ini, anak usaha ENRG melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi

## 2. Indikasi Tax Evasion GEMS

Indikasi tax evasion yang terjadi pada perusahaan GEMS berawal dari meningkatnya penjualan yang semula tahun 2010 berada di jumlah Rp 927.111.965.072, meningkat tajam pada tahun 2011 menjadi Rp 2.861.548.447.435, dan kemudian terus meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 3.958.897.172.445. Meningkatnya penjualan tersebut diikuti dengan menurunnya beberapa komponen rasio dari beban usaha, yaitu:

- a. Rasio beban gaji/penjualan pada tahun 2010 yang berada di angka 7,81% menurun terus pada tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah 4,54% dan 3,42%. Penurunan rasio biaya gaji/penjualan ini mungkin disebabkan karena ada penambahan jumlah investasi aset, hal tersebut terlihat dari jumlah rasio penyusutan/penjualan yang mengalami peningkatan.

Tabel 4.5.  
Rasio Benchmark Terkait Penurunan Rasio Biaya Gaji, Sewa, Penyusutan, dan lain-lain GEMS Tahun 2010-2012

	GEMS		
	2010	2011	2012
Penjualan	927.111.965.072	2.861.540.447.435	3.958.897.172.445
Biaya Gaji	72.448.664.451	129.963.159.911	135.471.209.985
Rasio gaji/penjualan	7,81%	4,54%	3,42%
Beban Sewa	13.553.376.982	23.444.997.307	26.084.411.953
rasio sewa/penjualan	1,46%	0,82%	0,66%
Beban Penyusutan	3.831.922.164	7.715.149.995	16.053.115.280
rasio penyusutan/penjualan	0,41%	0,27%	0,41%
Beban Lain-Lain	104.882.830.876	280.961.922.023	423.953.808.303
rasio lain-lain/penjualan	11,31%	9,82%	10,71%

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2010-2012

- b. Rasio sewa/penjualan dan rasio bunga/penjualan yang berada di posisi konstan dan tidak terlalu signifikan berubah.
- c. Dari data tersebut, melihat bahwa penjualan yang meningkat dan rata-rata rasio beban usaha sewa, gaji, dan penyusutan tidak terlalu berubah seharusnya jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih tinggi. Akan tetapi pada datanya jumlah pajak terhutang dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan yakni dari Rp 101.684.659.667 menjadi Rp 40.050.139.218. Penurunan jumlah yang cukup besar ini dikarenakan faktor membesarnya beban usaha lain-lain dan beban luar usaha lainnya.

Tabel 4.19.  
Pengujian CTTOR, PPM GEMS Tahun 2010-2012

	GEMS			DUP	SELISIH		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
Penjualan	927.111.965.072	2.861.540.447.435	3.958.897.172.445				
PPH Terutang/BEBAN PAJAK PENGHASILAN	6.732.754.993	101.604.659.667	40.050.139.218				
Labas Bersih Setelah Pajak/LABA NETTO	33.961.069.647	301.659.878.383	178.934.525.099				
CTTOR	0,73%	3,55%	1,01%	11,01%	-10,28%	-7,40%	-10,00%
PPM	3,68%	10,54%	4,52%	25,37%	-21,71%	-14,83%	-20,65%
CTTOR/PPM=	19,82%	33,21%	22,30%	43,40%	-23,57%	-9,69%	-21,02%

- d. Rasio beban lain-lain usaha yang dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan dari 9,82% menjadi 10,71%. Dengan rincian yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah akun lain-lain memuat jumlah yang cukup besar dimana hal tersebut tidak terdapat rincian datanya lebih detail. Hal ini memungkinkan terjadinya tax evasion sehingga disarankan

DJP melakukan pengamatan lebih detail. Selain itu juga, hal yang dimungkinkan yaitu pengkoreksian fiskal yang kurang tepat sehingga beban lain-lain memiliki jumlah yang besar seperti akun kesejahteraan karyawan, komunikasi dan listrik butuh ditinjau apakah benar boleh dibebankan atau tidak. Selain itu untuk akun beban luar usaha lainnya GEMS juga sama memiliki jumlah yang tidak dirinci detailnya, yang terinci biasanya hanya kerugian selisih kurs dan lain-lain, jumlah lain-lain inilah yang tidak jelas datanya dan berjumlah cukup besar. Kedua rasio beban lain-lain usaha dan beban lain-lain luar usaha ini yang menurut penelitian ini menjadi pemicu adanya identifikasi tax evasion.

Tabel 4.20.  
Rincian Biaya Lain-lain GEMS 2010-2012

	GEMS		
	2010	2011	2012
<b>Beban Penjualan:</b>			
Dongkrak Angkut	Rp 35.526.001.708	Rp 98.949.021.639	Rp 187.481.120.403
Jasa detmaga	Rp 20.550.367.459	Rp 72.635.793.283	Rp 106.750.062.659
Analisa dan Survei	Rp 1.910.604.620	Rp 5.310.629.697	Rp 8.505.061.830
Dokumen ekspor	Rp 328.565.333	Rp 488.285.627	Rp 771.239.581
Asuransi pengapalan	Rp 199.805.900	Rp 388.081.368	Rp 1.067.495.949
<b>Beban Umum dan Administrasi:</b>			
Jasa Profesional	Rp 2.854.945.071	Rp 19.386.798.976	Rp 13.743.587.264
Biaya Operasional Kantor	Rp 7.479.121.610	Rp 15.840.589.900	Rp 15.754.167.173
Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 4.693.794.975	Rp 14.791.607.666	Rp 22.421.397.911
Asuransi	Rp 7.925.583.470	Rp 9.836.995.891	Rp 5.038.778.323
Pergalangan Dinas	Rp 4.603.345.179	Rp 9.404.545.214	Rp 9.372.426.731
Transportasi	Rp 2.615.403.850	Rp 6.090.796.896	Rp 6.824.593.784
Imbalan pasti pasca kerja	Rp 4.710.896.000	Rp 5.952.089.000	Rp 7.324.295.000
Jamuan dan sumbangan	Rp 881.016.988	Rp 3.445.404.615	Rp 2.835.090.458
Biaya operasional tambang	Rp 1.364.560.626	Rp 2.307.542.414	Rp 9.559.052.478
Pendidikan dan pelatihan	Rp 426.051.778	Rp 1.649.007.000	
Amortisasi piranti lunak	Rp 360.609.621	Rp 1.644.284.921	Rp 3.424.658.757
Pajak-pajak	Rp 1.530.813.860	Rp 1.569.177.075	Rp 6.834.593.784
CSR	Rp 176.896.764	Rp 1.323.679.734	
Listrik dan komunikasi	Rp 1.236.777.905	Rp 1.273.837.649	
Perjalanan	Rp 168.050.000	Rp 1.241.069.595	
Iuran tetap	Rp 877.274.075	Rp 845.311.796	
komunikasi	Rp 326.830.796	Rp 801.438.653	
Peralatan	Rp 1.280.709.938	Rp 745.944.906	
Kesejahteraan Karyawan	Rp 504.671.597	Rp -	Rp 5.755.386.066
lain-lain	Rp 2.409.169.751	Rp 5.042.015.734	Rp 10.490.876.152
<b>TOTAL</b>	<b>Rp10.483.836.876</b>	<b>Rp28.961.922.259</b>	<b>Rp 423.953.808.303</b>

Sumber : BEI 2010-2012

- e. Sedangkan untuk penghasilan luar usaha GEMS tidak terlalu dijadikan point penting karena pada umumnya penghasilan luar usaha ini didapat karena adanya penghasilan jasa pelabuhan seperti menyewakan conveyor.

Pendapatan jasa pelabuhan yang diterima BORNEO untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 meliputi sewa pemakaian mesin loading conveyor dan crushing plant masing-masing sebesar Rp 47.918.439.572 and Rp 13.911.333.365 yang disajikan sebagai 'Penghasilan jasa pelabuhan' dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**BORNEO (lanjutan)**

Pendapatan jasa pelabuhan yang diterima BORNEO untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 meliputi sewa pemakaian mesin loading conveyor dan crushing plant masing-masing sebesar Rp7.408.128.700 dan Rp47.918.439.572 yang disajikan sebagai 'Penghasilan jasa pelabuhan' dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

f. Selain itu, penjelasan tambahan yang perlu diketahui lagi yaitu menyangkut beban pokok penjualan yang terdiri dari berbagai macam rincian, dimana overhead pertambangan memiliki jumlah kedua terbesar. Yang salah satunya yaitu terdiri dari penyusutan aktiva tetap dan sisanya tidak dijelaskan. Akun overhead pertambangan juga perlu dianalisis lebih detail, karena seringkali tax evasion dilakukan pada beban pokok penjualan ini.

KOMPONEN BEBAN POKOK PENJUALAN	2010	2011	2012
<b>Beban Produksi</b>			
Jasa penambangan	Rp 184.931.512.399	Rp 598.756.915.040	Rp 875.526.314.095
biaya dana hasil produksi batubara	Rp 44.512.743.169	Rp 162.804.577.572	Rp 212.588.958.005
Onghos angkut batubara	Rp 158.745.164.647	Rp 275.981.600.624	Rp 502.791.781.607
Amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan	Rp 8.168.072.139	Rp 10.589.608.670	Rp 13.962.293.411
Penggunaan lahan	Rp 7.233.020.646	Rp 36.577.786.677	Rp 32.033.232.904
Sewa Peralatan	Rp 5.725.671.124	Rp 19.711.754.333	Rp 25.024.435.250
Overhead pertambangan	Rp 53.522.845.983	Rp 208.264.465.993	Rp 245.411.899.897
Jumlah Beban Produksi	Rp 462.239.030.105	Rp 1.312.686.719.109	Rp 1.908.138.914.369
<b>Perediaan Batubara</b>			
Perediaan awal tahun	Rp 12.476.174.170	Rp 50.570.622.934	Rp 97.637.704.162
Pembelian	Rp 255.238.161.886	Rp 780.585.912.453	Rp 1.336.102.598.816
Perediaan akhir tahun	Rp (50.570.622.934)	Rp (96.197.412.402)	Rp (103.220.203.378)
Kenaikan Bersih	Rp 217.143.713.122	Rp 714.959.122.985	Rp 1.330.520.195.600
Jumlah Beban Pokok Penjualan	Rp 679.382.743.227	Rp 2.027.645.842.094	Rp 3.238.659.079.969

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2010-2012

3. Indikasi Tax Evasion ENRG

Hal serupa juga terlihat pada perusahaan ENRG, dimana penjualan dari 2010 hingga tahun 2012 terus mengalami kenaikan dari Rp 1.249.710.407.000 menjadi Rp 2.122.862.753.000 dan puncaknya tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp 5.744.633.958.144. Meningkatnya penjualan ini ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya rasio beban gaji/penjualan, rasio beban sewa/penjualan, rasio beban penyusutan/penjualan.

a. Seperti rasio gaji/penjualan yang pada tahun 2010 berada di angka 9,08% menurun cukup drastis sehingga pada tahun 2011

menjadi 3,14% dan di tahun 2012 menjadi 0,89%. Penurunan rasio beban gaji/penjualan ini dikarenakan faktor penurunan jumlah upah gaji tenaga kerja walaupun pada tahun 2011 jumlah pekerja naik menjadi 671 orang dan tahun 2012 naik menjadi 681 orang. Kenaikan jumlah tenaga kerja ini ternyata tidak diikuti dengan kenaikan upah tenaga kerja, tunjangan, dan manfaat bagi karyawannya.

Tabel 4.13. Rasio Benchmark Terkait Penurunan Rasio Biaya Gaji, Sewa, Penyusutan, dan lain-lain ENRG Tahun 2010-2012

	ENRG 2010	ENRG 2011	ENRG 2012
Penjualan	1.249.710.407.000	2.122.862.753.000	5.744.633.958.144
Biaya Gaji	113.453.842.000	66.562.200.000	51.227.947.800
Rasio gaji/penjualan	9,08%	3,14%	0,89%
Beban Sewa	5.380.011.000	6.066.500.000	7.505.954.812
rasio sewa/penjualan	0,43%	0,28%	0,13%
Beban Penyusutan	559.018.000	734.700.000	1.972.897.456
rasio penyusutan/penjualan	0,04%	0,03%	0,03%
Beban Lain-lain	34.734.710.000	45.521.266.000	53.635.325.568
rasio lain-lain/penjualan	2,79%	2,14%	0,93%

Sumber: Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012

b. Begitu juga dengan data rasio beban sewa, rasio beban penyusutan yang tidak terlalu berfluktuatif berubah, cenderung agak stabil dari tahun ke tahun.

c. Walaupun ada kenaikan di beban usaha lain-lain yang dari tahun 2010 berjumlah Rp 33.400.502.000, tahun 2011 sejumlah Rp 40.086.916.040, dan pada tahun 2012 menjadi Rp 53.382.674.005. Kenaikan beban usaha lain-lain yang sudah dijabarkan di rincian sebelumnya akun lain-lain tidak terlalu memiliki jumlah yang besar seperti pada GEMS, sehingga disimpulkan beban usaha lain-lain masih dalam keadaan wajar.

	2010	2011	2012
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Kantor	Rp 5.680.011.000	Rp 13.927.966.000	Rp 21.733.229.229
Jasa Profesional	Rp 10.893.874.000	Rp 14.544.770.000	Rp 14.045.884.000
Representasi dan sumbangan	Rp 13.752.063.000	Rp 11.898.598.000	Rp 11.924.461.201
Perjalanan dinas	Rp 2.335.536.000	Rp 5.580.782.000	Rp 3.200.024.023
Lain-lain	Rp 559.018.000	Rp 734.700.000	Rp 1.398.205.395
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 33.400.502.000</b>	<b>Rp 40.086.916.040</b>	<b>Rp 53.382.674.005</b>

d. Seperti yang dijabarkan diatas, kemungkinan terbesar yang menyebabkan penurunan pembayaran pajak ENRG dikarenakan karena membesarnya jumlah

beban bunga baik yang diperoleh dari pinjaman ke bank atau pinjaman kepada pihak ketiga lainnya. Jumlah beban bunga tersebut termasuk tergolong besar yaitu Rp 296.604.156.000 (tahun 2010), Rp 375.908.257.000 (tahun 2011), dan Rp 804.141.659.208 (pada tahun 2012). Membengkaknya beban bunga ini yang kemudian dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto yang menjadi penyebab utama rasio pembayaran pajak masih dibawah DJP. Beban bunga ini menjadi besar mungkin dikarenakan perusahaan ENRG banyak melakukan pengumpulan modal dengan cara meminjam, sehingga beban bunga menjadi membengkak lebih besar.

Tabel 4.17.  
Rincian Beban Bunga ENRG 2010-2012

	2011	2010
Beban bunga pinjaman	248.673.917	277.510.676
Beban keuangan lainnya	127.234.340	19.093.482
<b>Total</b>	<b>375.908.257</b>	<b>296.604.156</b>

- e. Sedangkan untuk penghasilan luar usaha ENRG tidak terlalu dipermasalahkan karena ENRG tidak banyak menerima penghasilan dari luar usaha, hanya pendapatan bunga saja.
4. Relevansi
- Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan pengujian T-test, dapat dilihat bahwa hasilnya menunjukkan banyaknya komponen rasio yang memiliki perbedaan dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam melihat relevansi data rasio benchmarking DJP dari SE-68/PJ/2010 dengan kondisi sekarang ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Indikasi *Tax Evasion*

Dari GEMS dan ENRG dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan terjadi *tax evasion* terletak di dalam pengakuan beban, baik beban input lain-lain, beban bunga, beban pokok penjualan dan beban luar usaha lainnya. Hal ini dikarenakan terlalu besar jumlah yang dimasukkan ke dalam akun tersebut tanpa penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci.

### 2. Uji Kuantitatif (T-test)

Dari hasil diatas ada rasio yang memiliki perbedaan yaitu rasio Gross Profit Margin, Operating Tax Profit Margin, Pretax Profit Margin, Corporate Tax To Turn Over Ratio, Net Profit Margin, Dividend Payout Ratio, rasio PPN, rasio gaji/penjualan, rasio sewa/penjualan, rasio penyusutan/penjualan, rasio bunga/penjualan, rasio biaya di luar usaha/penjualan, rasio input lainnya/penjualan menunjukkan bahwa di dalam penentuan benchmark oleh DJP memang sangat diperlukan untuk diupdate setiap tahunnya agar hasil benchmark DjP masih dapat releban dengan kondisi saat ini.

Sedangkan untuk rasio yang tidak memiliki perbedaan adalah rasio penghasilan di luar usaha/penjualan. Hal ini mungkin dikarenakan tidak banyak dan tidak sering setiap perusahaan memperoleh penghasilan di luar usaha pokoknya. Apabila ada perusahaan yang mendapat penghasilan luar usaha tentunya hal tersebut tidak terjadi setiap tahunnya, sehingga hasil uji independent t sample untuk rasio penghasilan luar usaha/penjualan memiliki kesimpulan tidak ada perbedaan.

### 3. Relevansi

Selisih perbedaan yang terjadi atas perhitungan perusahaan dengan DJP disebabkan karena tidak relevannya data yang dibuat acuan (SE-68/PJ/2010) dengan konsisi pada perusahaan pada saat itu. Ketidakrelevan juga disebabkan karena kurangnya DJP dalam mengkatagorikan indikator setiap perusahaan mungkin berdasarkan ukuran perusahaan

(kecil, menengah atau besar) atau juga bisa mengindikasikan berdasarkan nilai penjualannya.

### Saran

Untuk DJP, terkait identifikasi tax evasion, yaitu agar DJP semakin menggalakkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang dalam melakukan pembayaran pajaknya berada di bawah rasio benchmarking DJP, terutama jika hal tersebut memiliki sudut yang terbalik dengan peningkatan penjualan yang relatif tinggi. Pemeriksaan lapangan perlu dilakukan secara rutin, teliti dan adil. Selain itu hendaknya DJP meng-update rasio benchmark yang baru, yang sesuai dengan kondisi bisnis saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, (2007) Sistem Informasi Kinerja Industri Konstruksi Indonesia: Kebutuhan Akan Benchmarking Dan Integrasi Informasi
- Anwar, (2011) Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov <<http://statistikian.blogspot.com/2012/09/uji-normalitas-dengan-kolmogorov-smirnov.html>>. Diakses tanggal 17 Oktober 2013
- Badan Pusat Statistik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 <[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=11&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11&notab=1)>. Diakses tanggal 20 Agustus 2013
- Duwi Consultant, (2011) Independent Samples T test <<http://duwiconsultant.blogspot.fr/2011/11/independent-samples-t-test.html>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2013
- Hida, Ramdhania El (2011) Penerimaan Pajak 2010 Tak Capai Target Karena Tingginya Restitusi <<http://finance.detik.com/read/2011/01/04/170543/1539149/4/penerimaan-pajak-2010-tak-capai-target-karena-tingginya-restitusi>>. Diakses tanggal 22 Oktober 2013
- Kurniawan, 2013. Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P 2012. <<http://m.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>>. Diakses tanggal 25 September 2013
- Manse, (2011) Uji Normalitas Dengan Menggunakan Uji Outlier <<http://mansendyyyy.blogspot.com/2011/06/uji-normalitas-dengan-menggunakan-uji.html>>. Diakses tanggal 17 Oktober 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum
- Rahmany, A. Fuad (2012) Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak 2011 Capai 99,3 Persen <<http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen>>. Diakses tanggal 22 Oktober 2013
- Rusydi, Khoiru dan Kusuwati, A, (2008) Manajemen Perpajakan dan Analisa Deteksi Dini Terhadap Tax evasion Melalui Metode Benchmarking
- Sarwono, Jonathan, (2011) Buku Pintar IBM SPSS Statistic 19. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Surat Edaran No. 68/PJ./2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III
- Surat Edaran No. 96/PJ./2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya

